



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan Audit BPK Capai Rp 4,22 Miliar

BENGKULU, BE - Pembangunan infrastruktur di APBD 2019, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyisakan masalah. Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas belanja modal dan barang jasa tahun 2019, terdapat temuan sebesar Rp 4,22 miliar. Baik itu untuk pembangunan paket Gedung, jalan dan irigasi.

"Kita temukan, ada yang tidak sesuai dengan kontrak, atas pekerjaan yang sudah dilakukan," terang Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, R Aryo Seto Bomantari SE MM Ak CA kepada BE, usai melakukan penyerahaan LHP kepada empat pmda, yaitu Pemprov Bengkulu, Pemda Lebong, Seluma dan Mukomuko, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, kemarin (20/1).

Dijelaskannya, jika pekerjaan yang sudah dilakukan itu sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani, maka tidak akan menjadi temuan BPK. "Kecuali masalah itu, pemprov sudah sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Baik itu untuk proses pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Selain pemprov, yang menjadi temuan BPK atas pekerjaan gedung, jalan, dan irigasi dengan total keseluruhan sebesar Rp 5,292 miliar, ada juga di dua kabupaten. Yaitu, Kabupaten Lebong sebesar Rp 598,58 juta dan Pemda Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 468,53 juta. "Semua temuan, tidak sesuai dengan kontrak," papar Aryo.

Disamping itu, selain temuan soal pembangunan infrastruktur, juga ada temuan kelebihan pembayaran paket pekerjaan. Total keseluruhan sebesar Rp 823,66 juta. Hal ini terjadi di Pemda Kabupaten Seluma sebesar Rp 542,94 juta, Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 194,47 juta dan Kabupaten Lebong atas pekerjaan yang tidak dilakukan sebesar Rp 86,25 juta. "Yang kelebihan bayar ini wajib dikembalikan," tegasnya.

Termasuk juga ada potensi kelebihan pembayaran pekerjaan, lalu ada juga terkait jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang diputus kontrak belum dicairkan. (lihat grafis) "Harusnya, uang jaminan itu bisa dicairkan," beber Aryo.

Begitupun terkait peruntukan belanja modal peralatan dan mesin belum sesuai kebutuhan penggunaan, juga jadi temuan. Parahnya, ada juga pembangunan gedung berpotensi gagal konstruksi. "Kita lihat juga masih ada yang memalsukan dokumen penawaran. Harusnya ini terjadi terjadi dan menjadi temuan BPK," ujarnya.

Audit yang di lakukan BPK, ini sejak tanggal 13 November sampai 22 November 2019. Waktu selama 35 hari ini, menjadi prioritas, untuk melihat ada atau tidaknya indikasi kerugian negara. Agar pemerintah daerah, tidak menyalahi aturan dalam penggunaan uang negara. "Kita minta, dalam waktu 60 hari kedepan. LHP ini bisa diselesaikan, termasuk pengembalian uang negara," kata Aryo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Dedy Ermanah mengatakan, apa yang menjadi temuan itu akan tetap dilakukan tindak lanjut, dari waktu yang diberikan oleh BPK. "Kita akan tindak lanjut secepatnya," ujar Dedy.

Adanya temuan itu, menurutnya, atas kelemahan SDM yang dimiliki oleh Pemprov Bengkulu. Sehingga kedepan, masalah ini tidak kembali muncul. "SDM kami masih jauh untuk kebutuhan organisasi," tegasnya.

Disisi lain, Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, temuan ini tidak akan terjadi, jika semua pejabat bekerja dengan baik. Tahun APBD 2020 yang sudah teranggarkan, dewan meminta, hal ini tidak terulang kembali. "Jangan lagi, kami ingatkan. Bekerjalah dengan bagus. Kalau bagus, hati tenang, tidur nyeyak. Kalau kecil bisa ditoleransi, kalau sudah besar seperti ini, maka tetap harus dilakukan tindak lanjut," tegasnya.

Anggaran tahun 2019, menurut Suharto, di Pemprov Bengkulu sudah berantakan. Banyak pekerjaan tidak dibayarkan. Termasuk pekerjaan juga ada yang tidak selesai. Dampaknya, akan menjadi utang kembali pemprov Bengkulu kepada pihak ketiga. "Anggaran pemprov ini amburadul sekali. Mana pengelolaan keuangannya. Kami ingatkan jangan terulang lagi. Kalau seperti ini terus, kami di DPRD, bisa tidak akan menganggarkan untuk bayar utang," tandas Suharto. (151)

TEMUAN PEMERIKSAAN TERKAIT BELANJA MODAL

1. Paket pekerjaan gedung, jalan, dan irigasi tidak sesuai kontrak;
 - Seluruhnya sebesar Rp5,292 M
 - Pemprov Bengkulu sebesar Rp 4,22 miliar (Rp 3,474 miliar + Rp751,85 juta
 - Kabupaten Lebong sebesar Rp 598,58 juta
 - Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 468,53 juta
 2. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan;
 - Seluruhnya sebesar Rp 823,66 juta
 - Kabupaten Seluma sebesar Rp 542,94 Juta (Rp 318,89 juta + Rp 224,05 juta
 - Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 194,47 juta (Rp 110,75 juta + 183,72 juta)
 - Kabupaten Lebong atas pekerjaan yang tidak dilakukan sebesar Rp 86,25 juta
 3. Potensi kelebihan pembayaran pekerjaan;
 - Pekerjaan pembangunan Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong sebesar Rp 38,19 juta
 4. Denda keterlambatan atas paket pekerjaan yang belum dan kurang dikenakan;
 - Total temuan Rp 38,03 juta
 - Kabupaten Lebong sebesar Rp 25,02 juta
 - Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 13,01 juta
 5. Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang diputus kontrak belum dicairkan;
 - Dua paket pekerjaan putus kontrak pada Dinas PU Kabupaten Lebong sebesar Rp 129,27 juta
 - Pembangunan Gedung Rawat inap VIP pada RSUD Mukomuko sebesar Rp 163,08 juta
 6. Peruntukan belanja modal peralatan dan mesin belum sesuai kebutuhan penggunaan
 - Temuan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong sebesar Rp 1,06 miliar
 7. Pembangunan gedung berpotensi gagal konstruksi;
 - pembangunan gedung rawat inap VIP RSUD Mukomuko, sebesar Rp 978,51 juta
- Kegagalan bangunan disebabkan :
- Kontraktor tidak mempunyai orang yang benar-benar memahami teknis pembangunan gedung khususnya yang menggunakan konstruksi bore pile
 - Kompetensi dan Konsultan Pengawas diragukan. Sebab, inspektor merupakan lulusan SMA dengan Jurusan IPS dan belum berpengalaman atas pengawasan pekerjaan gedung

TEMUAN PEMERIKSAAN TERKAIT BELANJA BARANG JASA

1. Kelebihan Pembayaran Gaji Personil Pada Belanja Konsultansi
 - Belanja jasa konsultansi di 5 OPD di Kabupaten Mukomuko, dengan total temuan sebesar Rp 226,47 juta
2. Pengadaan pengembangan ternak kambing pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat lebih bayar di Pemda Mukomuko sebesar Rp 18,83 juta
3. Terdapat dokumen personil tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam dokumen penawaran dan kontrak/SPK konsultansi yang tidak dapat diyakini kebenarannya pada Kabupaten Mukomuko.